



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam mengerjakan penelitian ini, penulis menggunakan dua penelitian yang membahas foto jurnalistik sebagai acuan referensi. Kedua penelitian tersebut adalah *Konstruksi Konflik Aceh dalam Foto Di Media Cetak Selama Darurat Militer 2003: Analisis Semiotika Terhadap Media Kompas dan Republika* karya Orion Cornellia, yang saat itu menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, serta *Analisis Semiotika Foto Berita Headline Koran Tempo* (2009) karya Angga Rizal Nurhuda, yang dibuat saat ia menempuh kuliah strata 1 Konsentrasi Jurnalistik, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian pertama adalah mengenai foto jurnalistik dalam media *Kompas* dan *Republika*. Dalam penelitian ini Cornellia menggunakan metode semiotika analitik sebagai pisau analisisnya. Tujuan penelitian Cornellia adalah untuk mengetahui bagaimana *Kompas* dan *Republika* mengkonstruksi konflik Aceh melalui foto.

Dalam penelitiannya, Cornellia menyimpulkan bahwa secara umum, *Kompas* merepresentasikan konflik Aceh sebagai peperangan melawan

disintegrasikan bangsa. TNI di dalam konflik Aceh direpresentasikan sebagai pahlawan bangsa, yang berjuang untuk mempertahankan Aceh sebagai bagian dari NKRI. Begitu juga dengan *Republika*, menggambarkan konflik Aceh sebagai konflik yang menyengsarakan masyarakat, namun juga penampilan yang lebih utuh. Bukan saja menggambarkan TNI yang sedang beroperasi menjaga keamanan, tapi juga menggambarkan keseharian TNI dan aksi sosial yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan Cornellia. Kesamaan tersebut terletak pada isu yang diangkat, yaitu bertema konflik. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Cornellia adalah karya foto jurnalistiknya serta media yang diteliti. Penulis meneliti foto jurnalistik yang ada pada media online *Okezone.com*, sedangkan Cornellia meneliti foto jurnalistik yang terdapat di media cetak *Kompas* dan *Republika*. Perbedaan lain terletak pada metode analisis, yaitu Cornellia menggunakan semiotika analitik, sedangkan penulis menggunakan metode semiotika Charles S. Peirce.

Penelitian yang kedua yaitu karya Angga Rizal Nurhuda yang berjudul *Analisis Semiotika Foto Berita Headline Koran Tempo*. Nurhuda menganalisis empat foto berita *headline* koran tempo tentang perang Israel dan Palestina dalam penelitiannya. Penelitian Nurhuda bertujuan untuk mengetahui makna denotasi, konotasi, serta mitos yang terkandung di dalam foto berita *headline Koran Tempo* tentang perang Israel Palestina, dengan menggunakan semiotika Roland Barthes sebagai pisau analisisnya.

Dalam penelitiannya Nurhuda menyimpulkan bahwa dari empat sampel foto yang dianalisis, tidak semuanya memiliki enam unsur konotasi semiotika Roland Barthes, tapi ada beberapa unsur yang ditonjolkan, yaitu *Trick Effect*, *Photogenia*, dan *object*.

Penelitian ini dengan penelitian Nurhuda memiliki kesamaan, yaitu objek yang menjadi penelitian pada penelitian ini dan Nurhuda adalah foto jurnalistik. Sementara hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Nurhuda adalah media yang diteliti. Nurhuda meneliti media cetak, yaitu *Koran Tempo*, sedangkan penulis meneliti media *online*, yaitu *Okezone.com*. Perbedaan lain juga terletak pada metode analisis, penelitian ini menggunakan metode semiotika Charles S. Peirce.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu.

No.	Judul	Peneliti	Tahun	Teori	Metode
1.	<i>Konstruksi Konflik Aceh dalam Foto Di Media Cetak Selama Darurat Militer 2003: Analisis Semiotika Terhadap Media Kompas dan Republika</i>	Orion Cornellia	2004	Semiotika analitik tentang tanda Studi semiotika dalam foto media cetak Representasi realitas dalam foto media cetak	Semiotika analitik
2.	<i>Analisis Semiotika Foto Berita Headline Koran</i>	Angga Rizal Nurhuda	2009	Teori-teori mengenai fotografi dan	Metode semiotika Roland

	<i>Tempo</i>			foto berita	Barthes
				Teori-teori mengenai <i>headline</i>	
				Teori-teori mengenai Semiotika	

2.2 Representasi

Stuart Hall dalam bukunya *Representation: Cultural Representation and Signifying Practices*, mengatakan bahwa, “*Representation connects meaning and language to culture ... Representation is an essential part of the process by which meaning is produced and exchanged between members of cultures*” (Hall, 2003:17).

Suatu makna diproduksi dan dipertukarkan antaranggota masyarakat melalui representasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa representasi secara singkat adalah salah satu cara untuk memproduksi makna.

Menurut Hall ada dua proses representasi, yaitu (Wibowo, 2013:148):

a. Representasi Mental

Konsep tentang ‘sesuatu’ yang ada di kepala kita masing-masing (peta konseptual). Representasi mental masih merupakan sesuatu yang abstrak.

b. Representasi Bahasa

Bahasa berperan penting dalam proses konstruksi makna. Konsep abstrak yang ada di kepala kita harus diterjemahkan dalam ‘bahasa’ yang lazim, supaya kita bisa menghubungkan konsep dan ide-ide kita tentang sesuatu dengan tanda dari simbol-simbol tertentu.

Jika dikaitkan dengan foto atau gambar yang merupakan salah satu penyampaian komunikasi visual, bahasa ini kemudian membentuk bahasa visual. Secara sederhana bahasa visual adalah sebuah sarana penyampaian kepada khalayak menggunakan hal-hal yang dapat ditangkap secara kasat mata.²

Sementara Marcel Danesi (2010:3) mendefinisikan representasi sebagai proses perekaman gagasan, pengetahuan, atau pesan secara fisik. Secara lebih tepat dapat didefinisikan sebagai penggunaan ‘tanda-tanda’ (gambar, suara, dan sebagainya) untuk menampilkan ulang sesuatu yang diserap, diindra, dibayangkan, atau dirasakan dalam bentuk fisik.

Di dalam semiotika, menurut Marcel Danesi (2010:3-4), dinyatakan bahwa bentuk fisik sebuah representasi, yaitu X, pada umumnya disebut sebagai penanda. Makna yang dibangkitkannya (baik itu jelas maupun tidak), yaitu Y, pada umumnya dinamakan petanda; dan makna secara potensial bisa diambil dari representasi ini ($X = Y$) dalam sebuah lingkungan budaya tertentu, disebut sebagai signifikasi (sistem penandaan). Hal ini bisa dicirikan sebagai proses membangun suatu bentuk X dalam rangka mengarahkan perhatian sesuatu, Y,

² Hermansyah, Kusen Dony. “Bahasa Visual” dalam *website filmpelajar.com*. Diakses pada 21 Januari 2014.

yang ada baik dalam bentuk material maupun konseptual, dengan cara tertentu, yaitu $X = Y$.

Meskipun demikian, upaya menggambarkan arti $X = Y$ bukan suatu hal yang mudah. Maksud dari pembuat bentuk, konteks historis dan sosial yang terkait dengan terbuatnya bentuk ini, tujuan pembuatannya, dan seterusnya merupakan faktor-faktor kompleks yang memasuki gambaran tersebut. Agar tugas ini bisa dilakukan secara sistematis, terbentuklah di sini suatu terminologi yang khas.

Representasi bekerja pada hubungan tanda dan makna. Konsep representasi sendiri bisa berubah-ubah. Selalu ada pemaknaan baru. Menurut Nuraini Julianti, representasi berubah-ubah akibat makna yang juga berubah ubah. Setiap waktu terjadi proses negosiasi dalam pemaknaan.³

Representasi merupakan suatu bentuk usaha konstruksi. Karena pandangan baru yang menghasilkan pemaknaan baru juga merupakan hasil pertumbuhan konstruksi pemikiran manusia. Juliastuti mengatakan bahwa melalui representasi makna diproduksi dan dikonstruksi. Ini terjadi melalui proses penandaan, praktik yang membuat sesuatu hal bermakna sesuatu.

2.3 Konflik di Indonesia

Jika dilihat dari pengertian bahasa, konflik berasal dari bahasa Yunani *konfigere* yang berarti memukul. Dengan kata lain, dalam kondisi konflik bisa saja terjadi tindakan saling memukul. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan

³ Julianti, Nuraini. "Bagaimana Representasi Menghubungkan Makna dan Bahasa dalam Kebudayaan?" Dalam *website www.kunci.or.id*. Diakses pada 3 November 2013.

oleh Soerjono Soekanto dalam Murdiyatmoko (2007:27) bahwa konflik adalah suatu proses sosial ketika orang perorangan atau sekelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan atau kekerasan.

Namun, pemahaman konflik saat ini lebih luas dari sekadar memukul. Ada pula kondisi konflik, yang pihak-pihak yang berkonflik tidak menyerang secara fisik, seperti yang diungkapkan oleh Randal Collins dalam Murdiyatmoko (2007:28), bahwa masyarakat bukan tersusun dari konflik saja melainkan lebih dari itu, misalnya, ketika konflik tidak terjadi secara terbuka, yang ada adalah proses dominasi.

Pemahaman bahwa adanya konflik yang tidak merujuk pada kekerasan ini dipertegas oleh Ramlan Surbakti yang membedakan konflik menjadi dua jenis, yaitu konflik yang berwujud kekerasan dan konflik yang tidak berwujud kekerasan. Konflik yang mengandung kekerasan, pada umumnya terjadi dalam masyarakat-negara yang belum memiliki konsensus dasar mengenai dasar dan tujuan negara dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. Hura-hara (*riot*), kudeta, pembunuhan atau sabotase yang berdimensi politik (*terorisme*), pemberontakan, dan separatisme, serta revolusi merupakan sejumlah contoh konflik yang mengandung kekerasan (Surbakti, 2010:149-150).

Seringkali tindakan kekerasan muncul secara spontan pada masyarakat. Tindakan ini tujuannya tidak menentu, kadang ditumpangi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin menciptakan kekacauan. Misalnya,

tindakan suporter bola yang tim kesayangannya mengalami kekalahan. Oknum-oknum pendukung sebuah tim kesebelasan melakukan pengrusakan dan pembakaran fasilitas-fasilitas umum, seperti rambu-rambu lalu lintas dan taman kota, melempari rumah-rumah penduduk, dan lain sebagainya.

Konflik-konflik sosial yang diakhiri oleh tindakan kekerasan merupakan penyelesaian konflik yang paling buruk. Dengan kata lain, kekerasan sangat rendah tingkatannya dalam mencari alternatif jalan keluar atau pemecahan masalah (Waluya, 2007:35-36).

Konflik yang tidak berwujud kekerasan pada umumnya dapat ditemukan dalam masyarakat-negara yang memiliki konsensus mengenai dasar dan tujuan negara, dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. Adapun contoh konflik yang tidak berwujud kekerasan, yakni unjuk-rasa (demonstrasi), pemogokan (dengan segala bentuknya), pembangkangan sipil (*civil disobedience*), pengajuan petisi dan protes, dialog (musyawarah), dan polemik melalui surat kabar (Surbakti, 2010:149-150).

Konflik yang diwarnai dengan masalah-masalah sosial di Indonesia tidak bisa dihindari. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat cenderung menyimpan potensi konflik. Beberapa anggapan dasar yang mendukungnya menurut Ralf Dahrendorf, dalam Murdiyatmoko (2007:28) adalah sebagai berikut:

1. Setiap masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang tiada akhir.

2. Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya, dengan kata lain konflik adalah gejala yang melekat di setiap masyarakatnya.
3. Setiap unsur di dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan sosial.
4. Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang lain.

Jika dilihat dari posisi pelaku yang melakukan konflik, konflik dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu (Waluya, 2007:33):

1. Konflik vertikal, yaitu konflik antara komponen masyarakat di dalam struktur yang memiliki hierarki. Konflik ini dapat dialami antara warga dan negara, buruh dan majikan, dan lain sebagainya.
2. Konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kesamaan kedudukan. Konflik ini dapat dialami antara suku atau antara masyarakat. Konflik-konflik tersebut bisa berlatar belakang ekonomi, politik, agama, kekuasaan, dan kepentingan lainnya.

Sebagai proses sosial, konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan yang sulit didamaikan. Perbedaan tersebut antara lain menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, dan keyakinan. Tidak ada satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik, entah dalam cakupan kecil atau pun besar. Konflik dalam cakupan kecil, misalnya konflik dalam keluarga, dan konflik dalam

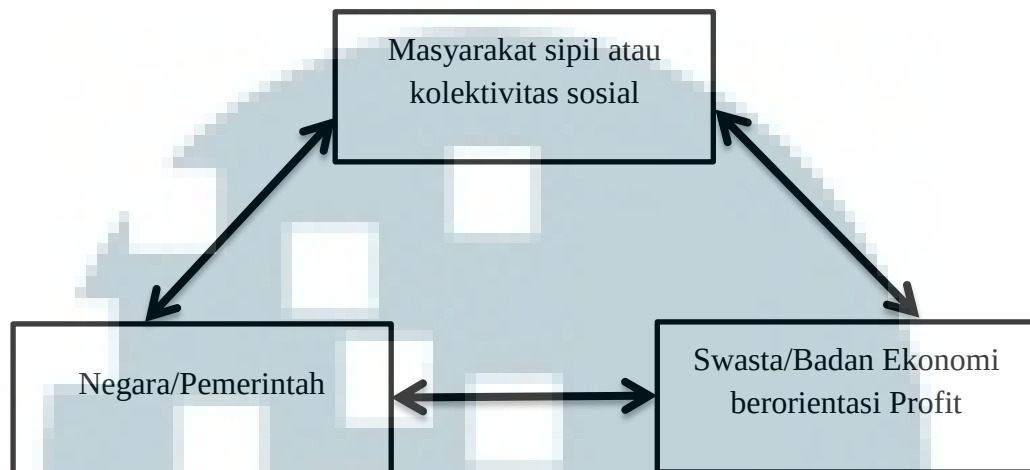
cakupan besar antara lain konflik antargolongan. Penyebab terjadinya konflik adalah sebagai berikut (Waluya, 2007:54):

1. Perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.
2. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda pula.
3. Perbedaan kepentingan antara individu dan atau kelompok, di antaranya menyangkut bidang ekonomi, politik, dan sosial.
4. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Di dalam masyarakat majemuk seperti di Indonesia, konflik mudah tersulut, terutama yang menyangkut isu SARA, dan dapat membahayakan stabilitas nasional. Adanya dominasi dalam bidang-bidang kehidupan seperti ekonomi atau pemerintahan oleh etnis tertentu, dapat memancing perasaan tidak senang etnis lain sehingga dapat menimbulkan benih-benih konflik (Waluya, 2007:34).

Terdapat tiga ruang kekuasaan dalam sistem sosial kemasyarakatan, yaitu ruang kekuasaan negara, masyarakat sipil atau kolektivitas sosial, dan sektor swasta. Konflik sosial bisa berlangsung di dalam setiap ruangan ataupun melibatkan agresi atau struktur antarruangan kekuasaan (Dharmawan, 2006:2).

Gambar 2.1 Tiga Ruang yang Dapat Diwarnai Konflik Sosial



Di ruang kekuasaan negara, terdapat sejumlah konflik sosial internal baik yang bersifat *latent* (terselubung-terpendam) maupun *manifest* (mewujud-nyata). Dalam hal ini, contoh yang paling mudah terjadi adalah konflik sosial yang berlangsung dalam praktik manajemen pemerintahan akibat olah kewenangan dalam pengendalian pembangunan yang berlangsung secara hierarkikal antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.

Selanjutnya di ruang kekuasaan masyarakat sipil atau kolektivitas sosial, berlangsung konflik sosial antara sesama kolektivitas sosial dalam mempertentangkan suatu objek yang sama. Beberapa contoh konflik ini bisa disebutkan antara lain adalah tawuran antar warga yang dipicu oleh hal-hal yang dalam kehidupan normal dianggap sederhana atau sepele, seperti masalah batas wilayah administratif (desa atau kabupaten). Selain itu, di ruang ini juga bisa berlangsung konflik sosial yang melibatkan identitas sosial komunal (*ethno-*

communal conflict) seperti ras, etnisitas dan religiusitas. Konflik dalam ruang ini menghasilkan dampak yang beragam (karena adanya persoalan yang dijadikan objek konflik) dan banyak yang berujung pada kematian, cedera, dan kerusakan di Indonesia.

Konflik sosial komunal di ruang sipil, seringkali ditemukan benang merah akar penyebabnya tersimpan mendalam (*deeply rooted*) pada persoalan *livelihood distress*. Persoalan kemiskinan dan keterdesakan ekonomi bercampur dengan perasaan ketidakpastian kehidupan (*survival insecurity*) akibat datangnya kompetitor dari sekelompok warga atau masyarakat (biasanya dengan identitas tertentu), menyebabkan eskalasi dan intensitas konflik sangat mudah memuncak. Dalam tataran konflik antarkelompok ini, kepentingan individual dalam kelompok seringkali juga diabaikan, karena telah diwakili oleh kepentingan kelompok (individu mengalami gejala sosial yang dikenal sebagai *oversocialized processes* yaitu tujuan dan kepentingan kolektif menjadi segala-galanya). Artinya, persaingan antarindividu pada suatu kelompok melawan kepentingan individu pada kelompok yang berbeda menjadi bagian integral konflik sosial antarkelompok. Dengan kata lain konflik sosial selalu melibatkan perselisihan antarkelompok (partai/pihak) yang individu di dalamnya menjadi konstituen pendukung perjuangan kelompoknya masing-masing. Konflik sosial semacam ini memang dapat dipahami melalui perspektif materialisme, dengan basis material (*sustenance needs security* atau masalah *livelihood*/nafkah) bagi kehidupan sekelompok warga sebagai akar konflik sosial yang harus diselesaikan.

Sementara itu di ruang kekuasaan swasta, konflik sosial lebih banyak terjadi oleh karena persaingan usaha yang semakin ketat. Tidak hanya itu, konflik sosial juga bisa dipicu oleh karena kesalahan negara dalam mengambil kebijakan dalam pemihakkan kepada kaum lemah. Misalnya adalah konflik sosial para pedagang UKM melawan perusahaan retail swasta multinasional yang merasuki kawasan-kawasan yang sesungguhnya bukan lahan mereka (Dharmawan, 2006:3-4).

Sebagai bagian dari proses sosial, dalam banyak kasus dijumpai bahwa konflik sosial tidak berlangsung secara serta-merta. Meski tipe konflik sosial yang bersifat “*spontaneous conflict*” tetap ada (tawuran antara pendukung sepak bola), namun jenis konflik tersebut biasanya lebih mudah dikendalikan dan segera diredam, dibandingkan yang bersifat konstruktif dan *organized*.

Prasyarat yang memungkinkan konflik sosial berlangsung, antara lain (Dharmawan, 2006:4):

1. Ada isu-kritikal yang menjadi perhatian bersama (*commonly probelmatized*) dari pihak berbeda kepentingan.
2. Ada inkompabilitas harapan/kepentingan yang bersangkutan dengan sebuah objek perhatian para pihak bertikai.
3. Gunjingan atau hasutan serta fitnah merupakan tahap inisiasi konflik sosial yang sangat menentukan arah perkembangan konflik sosial menuju wujud riil di dunia nyata.

4. Adanya kompetisi dan ketegangan dan psiko-sosial yang terus dipelihara oleh kelompok-kelompok berbeda kepentingan sehingga memicu konflik sosial lebih lanjut.
5. Pada derajat yang paling dalam, segala prasyarat konflik akan memicu masa kematangan untuk perpecahan.
6. *Clash* yang bisa disertai dengan *violence* (kerusakan atau kekacauan).

Jika dilihat dari perspektif kecepatan reaksi (*speed of reaction*) yang diberikan para pihak atas ketidaksepahaman yang terbentuk di kalangan berkonflik, maka konflik sosial dapat berlangsung dalam beberapa variasi tipe/bentuk, yaitu (Dharmawan, 2006:5):

1. Gerakan sosial damai (*peaceful collective action*) yang berlangsung berupa aksi penentangan, yang dapat berlangsung dalam bentuk: “aksi korektif”, “mogok kerja”, “mogok makan”, dan “aksi-diam”. Dalam hal tidak ditemukan resolusi konflik yang memuaskan, maka aksi damai dapat dimungkinkan berkembang menjadi “aksi membuat gangguan umum” (*strikes and civil disorders*) dalam bentuk demonstrasi ataupun huru-hara.
2. Demonstrasi (*demonstrations*) atau protes bersama (*protest gatherings*) adalah kegiatan yang mengekspresikan atas ketidaksepahaman yang ditunjukkan oleh suatu kelompok atas suatu isu tertentu. Aksi kolektif seperti ini biasanya

diambil sebagai protes yang reaksioner yang dilakukan secara berkelompok ataupun massal atas ketidaksepahaman yang ditunjukkan oleh suatu pihak tertentu kepada pihak berseberangan atas suatu masalah tertentu. Biasanya skala bersifat lokalitas, sporadik (meski tidak tertutup kemungkinan dapat meluas).

3. Kerusuhan dan huru-hara (*riots*), adalah peningkatan derajat kebingasan (*degree of violence*) dari sekedar demonstrasi. Kerusuhan berlangsung sebagai reaksi massal atas suatu keresahan umum. Oleh karena disertai dengan histeria massa, maka huru-hara seringkali tidak bisa dikendalikan dengan mudah tanpa memakan korban luka (bahkan kematian).
4. Pemberontakan (*rebellions*) adalah konflik sosial berkepanjangan yang biasanya digagas dan direncanakan lebih konstruktif dan terorganisasikan dengan baik. Pemberontakan bisa menyangkut perjuangan atas suatu kedaulatan atau mempertahankan “kawasan” termasuk eksistensi ideologi tertentu. Pemberontakan tidak harus berlangsung secara manifest, melainkan bisa diawali “di bawah tanah” sehingga tampak *latent* sifatnya.
5. Aksi radikalisme-revolusioner (*revolutions*) adalah gerakan penentangan yang menginginkan perubahan sosial secara cepat atas suatu keadaan tertentu.

6. Perang adalah bentuk konflik antarnegara yang sangat tidak dikehendaki oleh masyarakat dunia karena dampaknya yang sangat luas terhadap kemanusiaan.

Konflik sosial sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Aturan ini terdapat pada pasal 5 yang menyebutkan:

konflik dapat bersumber dari: (a) permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; (b) perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis; (c) sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi; (d) sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau (e) distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Sebenarnya pencegahan terhadap konflik sosial ini sudah dituliskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, pada pasal 6 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Ayat (1) Pencegahan konflik dilakukan dengan upaya: (a) memelihara kondisi damai dalam masyarakat; (b) mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; (c) meredam potensi Konflik; dan (d) membangun sistem peringatan dini.

Ayat (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui penguatan *capacity building*, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, dan menanamkan nilai-nilai integrasi bangsa. Namun pada praktiknya, konflik masih sering terjadi di kehidupan masyarakat.

Secara kesejarahan, bangsa Indonesia sesungguhnya bukanlah bangsa yang “bebas dari konflik sosial”. Jatuh bangun dan perluasan kekuasaan pemerintahan kerajaan-kerajaan Hindu (seperti Majapahit) dan Islam (Mataram)

di Nusantara sangat kental dengan strategi konflik sosial yang bahkan menjadi *mode of struggle* mereka. Sejarah pergerakan nasional modern yang diinisiasi oleh Budi Utomo pun sangat kental dengan aroma pertentangan-perjuangan dan kesadaran kelas antara bangsa terjajah melawan bangsa penjajah (Belanda). Tahun 1945 adalah titik tertinggi proses-proses konfliktual yang ditandai dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perjuangan dan perjalanan konflik yang sangat melelahkan dan memakan banyak korban (Dharmawan, 2006:8).

Hingga saat ini pun, konflik sosial bahkan terus terjadi secara berulang dan terus-menerus mereplikasi dirinya dari satu tempat ke lain tempat dengan bentuk yang beragam di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Konflik sosial, seolah telah menjadi bagian dari rutinitas dan keseharian masyarakat Indonesia. Intensitas dan persebaran kejadian konflik sosial menguat sejalan dengan multiplikasi kejadian konflik sosial yang dihembuskan melalui berita-berita tentang konflik sosial di media massa. Permunculan berita tentang konflik sosial di koran dan televisi telah membuat proses sosialisasi tanpa disadari telah membentuk opini tentang perbedaan kepada warga masyarakat di lain tempat untuk meniru dan mengimitasi proses-proses penyelesaian masalah melalui jalan kekerasan dan *violence* sebagai persoalan serupa yang dijumpai di lokalitas masing-masing.

2.4 Kelompok Sosial di Masyarakat

Di Indonesia, konflik sering kali melibatkan banyak orang atau kelompok dalam masyarakat. Kelompok-kelompok tersebut terbentuk dari beragam kondisi

dan situasi. Lebih jelasnya, kelompok-kelompok tersebut antara lain sebagai berikut.

Berdasarkan terhadap jenis yang sama, kelompok sosial dapat dibagi atas *in-group* dan *out-group*. Menurut W. G. Sumner dalam bukunya *Folkways*, istilah *in-group* memiliki pemahaman bahwa “kami” berbeda dengan “mereka”. Sikap *in-group* pada umumnya didasarkan pada faktor simpati dan selalu mempunyai perasaan dekat pada anggota-anggota kelompoknya, sedangkan sikap terhadap *out-group* selalu ditandai dengan antagonisme dan antipati (Murdiyatmoko, 2007:78).

Berdasarkan hubungan sosial dan tujuan, kelompok sosial dapat dibedakan menjadi kelompok primer dan kelompok sekunder.

1. Kelompok primer (*primary group*) adalah kelompok-kelompok yang saling mengenal anggotanya, serta terdapat kerjasama yang bersifat pribadi. Contohnya adalah keluarga, kelompok sepermainan, dan rukun tetangga.
2. Kelompok sekunder (*secondary group*) adalah kelompok besar yang terdiri dari banyak orang, hubungannya tidak harus saling mengenal secara pribadi, kurang akrab, dan sifatnya tidak langgeng karena mereka berkumpul berdasarkan kepentingan yang sama. Contohnya adalah orang-orang dengan hubungan kontrak (jual-beli) yang menyebabkan munculnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak (Murdiyatmoko, 2007:78-79).

Dalam konteks Indonesia, kelompok primer dan kelompok sekunder tercermin dalam paguyuban dan patembayan. Paguyuban (*gemeinschaft*) adalah pola masyarakat yang ditandai dengan hubungan anggota-anggotanya bersifat pribadi, sehingga menimbulkan ikatan yang sangat mendalam dan batiniah, misalnya pola kehidupan masyarakat pertanian umumnya bersifat komunal yang ditandai dengan ciri-ciri masyarakat yang homogen, hubungan sosialnya bersifat personal, saling mengenal, serta adanya kedekatan hubungan yang lebih intim (Murdiyatmoko, 2007:79).

Paguyuban terbagi ke dalam beberapa tipe yaitu:

1. Paguyuban karena ikatan darah (*gemeinschaft by blood*)

Berupa ikatan yang didasarkan pada ikatan darah atau keturunan. Misalnya keluarga, kelompok, dan kekerabatan.

2. Paguyuban karena tempat (*gemeinschaft of place*)

Terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggalnya, sehingga dapat saling tolong-menolong, misalnya rukun tetangga dan rukun warga.

3. Paguyuban karena pemikiran (*gemeinschaft of mind*)

Terdiri atas orang-orang yang walaupun tidak memiliki hubungan darah ataupun tempat tinggalnya tidak berdekatan, tetapi mereka memiliki jiwa dan pikiran yang sama karena ideologi yang dianut juga sama. Misalnya kelompok pengajian, kelompok diskusi, dan kelompok belajar (Murdiyatmoko, 2007:80).

Sedangkan patembayan (*gesselschaft*) adalah ikatan untuk jangka waktu yang pendek, bersifat formal, dan mekanis, sebagaimana dapat diumpamakan sebagai sebuah mesin, misalnya ikatan antarpedagang serta organisasi buruh dalam suatu pabrik. Dalam patembayan, pertentangan-pertentangan yang terjadi dapat dibatasi karena dalam patembayan terdapat *public life*, yaitu hubungannya bersifat untuk semua orang (Murdiyatmoko, 2007:80).

2.5 Fotografi Sebagai Media Komunikasi Visual

Istilah fotografi pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan Inggris, Sir John Herschell pada tahun 1839. Fotografi berasal dari kata *photos* (sinar/cahaya) dan *graphos* (mencatat/melukis). Secara harfiah, fotografi mencatat atau melukis dengan cahaya (Darmawan, 2009:19-20). Lebih rincinya, Giwanda (2001:2) mengatakan bahwa fotografi merupakan seni dan proses penghasilan gambar melalui cahaya pada film atau permukaan yang dipekan. Artinya, fotografi adalah teknik melukis menggunakan cahaya. Pada hakikatnya foto adalah jejak-jejak ingatan dari suatu masyarakat penyanggahnya, pada suatu masa. Foto, dengan kata lain, adalah sekumpulan relik memori kolektif (Svarajati, 2013:1).

Susan Sontag, dalam bukunya *On Photography*, menyebut fotografi sebagai sebuah meta-seni: sebuah medium sekaligus cita-cita tertinggi seni. Di abad ke-19, Walter Pater menyebut bahwa semua seni bercita-cita menjadi seperti musik yang mampu melebur habis bentuk dan isi. Sontag, di abad ke-20, mengoreksi pendapat Pater dan menandakan betapa semua seni justru bercita-

cita menjadi seperti fotografi. Selain sanggup hidup seperti musik yang mengolah mediumnya sebagai isi itu sendiri, fotografi juga berwatak demokratis karena bisa dikerjakan oleh siapapun—serempak mengeram kekuatan revolusioner mendobrak diskriminasi antara seni buruk dan seni indah (Sontag, 2005:7).

Dalam teori yang digali dari Paul Messaris, gambar-gambar yang dihasilkan manusia, termasuk fotografi, bisa dipandang sebagai suatu keberaksaraan visual. Dengan kata lain, gambar-gambar itu bisa dibaca. Sehingga gambar-gambar pun merupakan salah satu cara berbahasa. Jika berbahasa bisa diandaikan sebagai produk pikiran, dan pada gilirannya menjadi produk kebudayaan, sehingga tercipta wacana pengetahuan, maka demikian pula halnya dengan kehadiran gambar-gambar (Ajidarma, 2007:2006).

Paul Messaris menyatakan adanya empat keberaksaraan visual, yaitu:

1. Keberaksaraan visual sebagai prasyarat pemahaman media visual. Citra media visual, termasuk foto, sering berbeda dari penampilan dunia nyata. Karena perbedaan ini, bisa dikatakan bahwa kemampuan menginterpretasi media visual tergantung dari pengalaman sebelumnya.
2. Konsekuensi kesadaran umum keberaksaraan visual. Pengalaman dengan media visual tidak hanya merupakan jalan ke arah pengalaman visual yang lebih baik, tapi juga membawa ke arah peningkatan kemampuan untuk memahami tersebut. Kemampuan ini dibentuk oleh interpretasi atas media

visual, yang akan terpakai untuk kegiatan intelektual lainnya.

Pengalaman media TV dan film misalnya, mengubah pengertian anak-anak atas hubungan spasial di dunia nyata.

3. Kewaspadaan atas manipulasi visual. Pendidikan visual akan membuat pemandang lebih tahan atas manipulasi visual yang diupayakan di iklan TV, majalah, dan kampanye politik. Meski pembelajaran ini tidak berdampak banyak atas pemahaman komperhensif pemandang, tapi akan membuatnya waspada tentang bagaimana makna diciptakan secara visual.
4. Apresiasi Estetik. Kewaspadaan atas pengembangan makna media visual dalam tanggapan pemandang, juga dapat dilihat sebagai pembentukan dasar apresiasi estetik.

Pendapat Paul Messaris ini mendukung asumsi bahwa dalam suatu foto, sebagai media visual, bukan hanya dimungkinkan untuk menarik suatu makna, melainkan makna itu mungkin direkayasa untuk tampil dengan gagasan menghunjam. Sebuah foto jadinya bukan hanya representasi visual objek yang diproduksinya, melainkan mengandung pesan.

Menurut Roland Barthes, terdapat tiga aspek dalam fotografi: Operator, yaitu fotografer; Pemandang (*spectator*), yaitu yang melihat fotonya; dan Spektrum, yaitu apa pun yang dipotret (Adjidarma, 2007:28).

Dalam sebuah foto, Barthes juga menyebutkan bahwa terdapat *stadium* dan *punctum*. *Stadium* adalah suatu kesan keseluruhan secara umum, yang akan mendorong seorang Pemandang segera memutuskan sebuah foto bersifat politis

atau historis, indah dan tak indah, yang sekaligus juga mengakibatkan ekspresi suka atau tidak suka. Sedangkan *punctum* adalah fakta terinci dalam sebuah foto yang menarik dan menuntut perhatian Pemandang ketika memandangnya secara kritis, tanpa mempedulikan *stadium*. Dalam *punctum* itu menjelaskan mengapa seseorang terus-menerus memandang mengingat sebuah foto. Relasi *stadium* dan *punctum* ini menurut Barthes sendiri memang tidak jelas, namun bisa dihadirkan dalam proses penafsiran sebuah foto (Ajidarma, 2007:28).

Teori Barthes dan Messaris di atas membuktikan bahwa foto-foto merupakan wacana pengetahuan dan dapat mengandung makna.

Pendapat lain tentang foto dan makna keluar dari Berger, yang mengatakan bahwa sebuah foto menahan aliran waktu yang menunjukkan bahwa peristiwa yang dipotret pernah ada. Semua foto adalah dari masa lalu, dan masa lalu itu tertahan, tidak bisa melaju ke masa kini. Setiap foto menyajikan dua pesan, yaitu pesan menyangkut peristiwa yang dipotret, dan menyangkut sentakkan diskontinuitas. Antara momen yang terekam dan momen dan momen kini setelah melihat foto itu, terdapat sebuah jurang yang membuat foto menjadi pesan kembar (Ajidarma, 2007:30).

Dalam aliran waktu, sebuah foto membekukan momen seolah-olah merupakan imaji yang tersimpan, namun terdapat perbedaan yang mendasar: ketika imaji terkenang merupakan sisa (*residue*) pengalaman dan berkelanjutan, sebuah foto mengisolasi sebuah penampakan keterputusan sesaat (*disconnected instant*). Padahal dalam kehidupan, makna bukanlah sesuatu yang terjadi seketika itu juga. Makna ditemukan dalam apa yang dihubungkan, dan tidak bisa mengada

tanpa perkembangan. Fakta dan informasi, tidak dalam dirinya menyusun makna. Makna adalah suatu tanggapan, bukan hanya kepada yang-diketahui: makna dan misteri tidak terpisahkan, dan tidak satu pun dari keduanya bisa mengada tanpa berlalunya waktu. Sebuah kesesatan terpotret, hanya mampu termaknakan, ketika pemandang membacanya dalam suatu kepanjangan waktu yang melampaui kesesatan itu. Ketika kita menemukan sebuah foto bermakna, kita meminjaminya sebuah masa lalu dan masa depan (Ajidarma, 2007:31).

Menurut Berger, semua foto adalah mendua. Semua foto dicomot keluar dari kontinuitas. Diskontinuitas selalu memroduksi kemenduaan, namun meskipun mendua apabila sebuah foto ditampilkan memakai kata-kata, mereka memroduksi bersama sebuah kepastian, bahkan suatu pernyataan dogmatik. Dalam hubungan foto dan kata-kata, foto meminta interpretasi dan kata-kata biasanya akan memberi. Foto tak terbantah sebagai bukti, tapi lemah dalam makna, maka diberi makna oleh kata-kata. Adapun kata-kata, yang pada dirinya tetap berada di tingkat generalisasi, mendapat otentisitas spesifik dari ketakterbantahan foto (Ajidarma, 2007:30).

Peristiwa memotret secara teknis mudah dimengerti, yang agak rumit adalah memahami sifat penampakannya. Ketika seseorang memotret, pilihan atas apa yang dipotret merupakan suatu konstruksi budaya, yang terbuktikan dari apa yang tidak dipotretnya. Konstruksi itu merupakan suatu pembacaan atas peristiwa yang intuitif dan berlangsung cepat, memutuskan dengan segera pilihan atas objeknya. Pilihan ini akan sangat ditentukan oleh situasi sosial dan kehidupan pemotret, yang merupakan suatu argumen, yang merupakan suatu argumen, suatu

pengalaman, suatu menjelaskan dunia. Pada saat yang sama, hubungan material antara citra dan yang direpresentasikan adalah sesuatu yang segera dan tidak terkonstruksi. Seorang fotografer bisa mengatur segalanya kecuali mencampur proses melesatnya cahaya melewati lensa dan mencetak gambar pada film (Ajidarma, 2007:30).

Membandingkan dengan pendapat Barthes, bahwa foto merupakan suatu pesan tanpa kode, karena foto tak punya bahasa sendiri, maka sebuah foto tidak menerjemahkan penampakan, tapi mereka mengutip penampakan.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi, dampak fotografi telah menyebar ke seluruh dunia dan merambah beragam bidang kehidupan. Kini, hampir dapat dipastikan berbagai sisi kehidupan manusia menjadikan fotografi sebagai alat dan sarana untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya kebutuhan untuk dokumentasi pribadi dan keluarga, foto jurnalistik, juga kebutuhan yang bersifat formal sampai komersial sekalipun.

Berikut bidang-bidang spesialisasi fotografi yang mengalami perkembangan cukup pesat (Giwanda, 2001:56-57): Foto Jurnalistik (*Photo Journalism*), Fotografi Pernikahan (*Wedding Photography*), Fotografi Arsitektur (*Architectural photography*), *Fashion Photography*, Fotografi Ilmiah (*Scientific Photography*), Fotografi Udara (*Aerial Photography*), Fotografi Komersial, *Fine art Photography* (memandang fotografi sebagai media untuk mengekspresikan karya seni).

Dalam penelitian ini, objek yang menjadi unit analisis penulis adalah foto jurnalistik. Foto Jurnalistik menurut Oscar Motuloh dalam makalahnya yang

berjudul “Suatu Pendekatan Visual Dengan Suara Hati”, adalah suatu medium sajian untuk menyampaikan beragam bukti visual atas suatu peristiwa pada masyarakat seluas-luasnya, bahkan hingga kerak di balik peristiwa tersebut, tentu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya (Desintha, 2013:10).

Foto jurnalistik adalah bagian dari praktik jurnalisme yang berkuat dengan informasi tentang manusia dan kemanusiaannya. Karena itu fotografi dipercayai sebagai kebenaran faktual, representasi realitas (Svarajati, 2013:20). Meski foto jurnalistik atau foto berita adalah foto yang mengandung berita, foto berita tidak harus dibuat oleh wartawan foto atau pekerja pers. Siapa pun bisa membuatnya (Sugiarto, 2005:19).

Penggunaan foto jurnalistik pada koran dan majalah mulai berkembang pada tahun 1930-an. Perkembangannya sangat cepat sehingga teknologi foto dapat mendorong perkembangan media jurnalistik. Foto jurnalistik kemudian tumbuh menjadi suatu konsep dalam sistem komunikasi yang sekarang disebut sebagai komunikasi foto (*photographic communication*). Sebagai suatu lambang yang berdimensi visual, foto dan gambar dapat mendeskripsikan suatu pesan yang tidak secara eksplisit tertuang dalam komunikasi kata, baik lisan maupun tulisan (Muhtadi, 1999:101).

Foto sebagai media penyampaian informasi atau berita memiliki sifat yang sama dengan berita tulis. Keduanya harus memuat unsur apa (*what*), siapa (*who*), di mana (*where*), kapan (*when*), dan mengapa (*why*). Bedanya, dalam bentuk visual/gambar, foto berita punya kelebihan dalam menyampaikan unsur *how* yaitu bagaimana kejadian tersebut berlangsung secara lebih nyata karena

menampilkan kejadiannya dalam bentuk gambar sehingga menjadi lebih jelas (Sugiarto, 2005:19).

Meski memiliki kelebihan di unsur *how*, berita dalam foto tidak mampu mengedepankan keenam unsur tersebut dalam sebuah gambar. Maka dari itu kehadiran kata, teks, atau keterangan yang menjelaskan sangat diperlukan. Dalam media cetak, selain muncul individual sebagai berita foto dengan sedikit keterangan tambahan (*caption*), foto berita juga muncul sebagai pendamping tulisan ataupun dalam bentuk sekuens (serangkaian foto yang membidik kejadian secara beruntun) atau esai (beberapa foto yang saling menjelaskan) (Sugiarto, 2005:22).

Sama seperti berita tulis yang mempunyai sudut pemberitaan dari sebuah objek yang diberitakan, foto berita juga memiliki sudut penggambaran sendiri dari objek yang ditampilkannya. Pilihan untuk membidik objek tertentu, dengan pengambilan dari sudut penggambaran tertentu sampai dengan penguatannya. Foto juga dapat menimbulkan berbagai interpretasi. Tampilan sebuah realitas secara visual memiliki kesan tersendiri bila dibandingkan dengan kisah sebuah realitas yang ditulis dalam bentuk rangkaian kata-kata (Anto, 2005:36).

Selain harus mengandung berita, foto jurnalistik juga harus mencerminkan etika atau norma hukum, baik dari segi pembuatannya maupun penyarannya. Di Indonesia, etika yang mengatur foto jurnalistik ada pada kode etik yang disebut Kode Etik Jurnalistik. Pasal-pasal yang mengatur hal tersebut, khususnya pada pasal 2 dan 3.

Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, dengan cara menunjukkan identitas diri kepada

narasumber, menghormati hak privasi, tidak menyuap, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya, rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang, menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara, tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri, dan penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah (Kode Etik Jurnalistik, 2006).

Foto jurnalistik atau foto berita tidak selalu mengedepankan masalah/peristiwa seperti perang, huru-hara, atau demonstrasi. Foto jurnalistik juga memiliki beragam kategori sebagai berikut (Sugiarto, 2005:26-39); Berita *Spot*, Berita *Feature*, Berita Olahraga, Berita Potret, Berita Pariwisata, Berita *Fashion*, Berita Celah Kehidupan, Berita Lingkungan Hidup, Berita Satwa/Binatang, dan Berita Humor.

2.6 Jurnalisme Damai dan Jurnalisme Konflik dalam Karya Fotografi

Intensitas dan persebaran kejadian konflik sosial menguat sejalan dengan multiplikasi kejadian konflik sosial yang dihembuskan melalui berita-berita tentang konflik sosial di media massa. Permunculan berita tentang konflik sosial di media massa telah membuat proses sosialisasi tanpa disadari telah membentuk opini tentang perbedaan kepada warga masyarakat di lain tempat untuk meniru dan mengimitasi proses-proses penyelesaian masalah melalui jalan kekerasan dan *violence* bagi persoalan serupa yang dijumpai di lokalitas masing-masing (Dharmawan, 2006:8).

Dalam dunia jurnalistik, pemberitaan tentang konflik ada dalam dua bentuk, yaitu jurnalisme damai dan jurnalisme perang/konflik. Jurnalisme damai adalah praktik jurnalisme yang berdasar pada pertanyaan-pertanyaan kritis tentang manfaat aksi-aksi kekerasan dalam sebuah konflik dan tentang hikmah konflik itu sendiri bagi entitas manusia. Jurnalisme damai melihat pertikaian sebagai sebuah masalah, sebagai ironi kemanusiaan yang tidak seharusnya terjadi. Dalam konteks ini, jurnalisme damai pada dasarnya adalah seruan kepada semua pihak agar memikirkan hikmah konflik. Jurnalisme damai lebih berpretensi untuk menonjolkan harapan rekonsiliasi di kedua belah pihak. Genre jurnalistik ini lebih mengedepankan harapan dan hasrat untuk berdamai daripada aroma dendam dan kebencian kepada kedua belah pihak (Sudibyo, 2001:167).

Jurnalisme damai bukanlah hal baru. Pendekatan kerja jurnalisme ini digagas oleh Profesor Johan Galtung, ahli studi pembangunan, pada 1970-an. Galtung merasa “miris” melihat pemberitaan pers yang mendasarkan kerja jurnalistiknya secara hitam-putih atau kalah-menang. Pola kerja jurnalistik seperti ini ia sebut sebagai jurnalisme perang/konflik. Jurnalisme konflik lebih tertarik pada kekerasan, korban yang terluka atau tewas, dan kerusakan material. Jurnalisme perang, secara tidak sadar menggiring publik untuk memihak pada salah satu pihak yang bertikai. Galtung yang kemudian diikuti Annabel McGoldrick dan Jake Lynch mendorong pers mengubah teori klasik jurnalisme konflik menjadi jurnalisme damai. Pers harus mengambil peran memprovokasi pihak-pihak bertikai menemukan jalan keluar (Katahati, 2009:60).

Menurut Arbain Rambey, dalam buku *Resolusi Konflik dalam Jurnalisme Damai* (Anto, 2005:41), dalam memotret sebuah konflik atau kerusuhan, seorang fotografer jurnalistik harus memiliki *filter* jika akan melepas sebuah foto kepada pihak luar. Untuk sebuah kasus yang besar dan “berdarah-darah”, selalu ada peluang untuk pemberitaan yang damai, tapi tidak keluar dari rel realita dan fakta. Sebagai contoh adalah pada kasus Kerusuhan Mei 1998. Saat itu, lebih dari 200 orang mati terpenggang di sebuah Toserba yang terbakar di Jakarta Timur.

Untuk peristiwa itu, ada sebuah koran yang menampilkan mayat hangus sambil memeluk *tape recorder* di halaman pertamanya. Ada pula media yang menampilkan mayat-mayat yang hangus di RSCM. Foto-foto tersebut dapat memicu kengerian atau dendam pada masyarakat yang melihatnya. Foto-foto tersebut adalah contoh dari pemberitaan melalui sebuah foto berita dengan “kiblat” jurnalisme konflik.

Dalam kasus ini, redaktur foto harus bijaksana untuk tidak memilih foto yang menampilkan kekerasan atau hal-hal mengerikan. Dalam peristiwa kebakaran pada Toserba itu, pilihan yang diambil oleh *Harian Kompas* untuk memaparkan fakta banyaknya korban kebakaran adalah dengan menampilkan foto ratusan tas plastik hitam di kamar mayat RSCM. Foto juga tidak dibuat berwarna untuk menghindari keseraman atau terlihatnya darah dalam foto tersebut. Pertimbangan *Kompas*, menurut Arbain Rrambey, adalah agar masyarakat atau khalayak tahu berapa banyaknya korban kebakaran tanpa harus merasa jijik dan ngeri.

Beberapa bulan sebelum kerusuhan Mei 1998 itu, terjadi kerusuhan yang bernuansa SARA di Rengas Dengklok. Ratusan rumah ibadah, yaitu gereja dan kelenteng dirusak masa. Pada peristiwa itu, foto yang dipilih *Kompas* bukanlah foto ramainya kerusuhan, tetapi gambar reruntuhan bangunan dan onggokkan abu bekas kebakaran. Menurut pertimbangan *Kompas*, gambar sebuah gereja yang dibakar atau dirusak di Rengas Dengklok sangat mungkin memancing merusakkan masjid di daerah yang mayoritas penduduknya Kristen. Lalu, seperti bola salju, balas berbalas merusak bangunan ibadah “lawan” tak akan terelakkan.

Sebenarnya ada sebuah foto dari kerusuhan tersebut yang bisa memancing dendam. Foto itu adalah gambar patung Budha yang digantung di gerbang sebuah vihara yang dirusak massa. Bahkan foto itu sudah menjadi sebuah sampul buku yang menelaah Kerusuhan Rengas Dengklok tersebut. Menurut Arbain Rambey, seorang rekan yang menganut agama Budha merasa sakit hati melihat patung Budha diperlakukan seperti itu. Oleh sebab itu, pemilihan foto sebuah kejadian yang mengandung kekerasan tidaklah selalu harus menampilkan kekerasan pula.

2.7 Semiotika

Secara etimologis, istilah semiotika berasal dari kata Yunani *semion* yang berarti tanda (Wibowo, 2013:7). Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Semiotika atau dalam istilah Barthes, semiologi, pada dasarnya ingin mempelajari bagaimana kemanusiaan (*humanity*) memaknai hal-hal (*things*). Memaknai (*to signify*) dalam hal ini tidak dapat dicampuradukkan

dengan mengkomunikasikan (*to communicate*). Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu ingin berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda (Barthes, 1988:179; Kurniawan, 2001:53).

Secara terminologis, menurut Umberto Eco, semiotika atau semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan objek-objek, peristiwa-peristiwa seluruh kebudayaan sebagai tanda. Sementara, Van Zoest mengartikan semiotik sebagai “ilmu tanda (*sign*) segala yang berhubungan dengannya; cara berfungsinya, hubungan dengan kata lain, pengirimnya dan penerimanya oleh mereka yang mempergunakannya.

Batasan yang lebih jelas dikemukakan oleh Preminger, yaitu semiotik adalah ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial/masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik itu mempelajari sistem-sistem aturan-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti (Sobur, 2001:96).

Charles Moris mengatakan bahwa kajian semiotika pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam tiga cabang penyelidikan yaitu (Wibowo, 2013:5):

1. Sintaktik (*syntactics*) atau sintak (*syntax*): suatu cabang penyelidikan semiotika yang mengkaji “hubungan formal di antara satu tanda dengan tanda-tanda yang lain”. Dengan begitu hubungan-hubungan formal ini merupakan kaidah-kaidah yang mengendalikan tuturan dan interpretasi,

pengertian sintaktik kurang lebih adalah semacam ‘gramatika’.

2. Semantik (*semantics*): suatu cabang penyelidikan semiotika yang mempelajari “hubungan di antara tanda-tanda dengan designata atau objek-objek yang diacunya.” Designata adalah tanda-tanda sebelum digunakan di dalam tuturan tertentu.
3. Pragmatik (*pragmatics*): suatu cabang penyelidikan semiotika yang mempelajari “hubungan di antara tanda-tanda dengan *interpreter-interpreter* atau para pemakainya”-pemakaian tanda-tanda. Pragmatik secara khusus berurusan dengan aspek-aspek komunikasi, khususnya fungsi-fungsi situasional yang melatari tuturan.

Dari definisi dan penjelasan tentang semiotika di atas, dapat disimpulkan bahwa semiotika erat kaitannya dengan tanda. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan pendekatan terhadap tanda-tanda dalam semiotika.

Ada dua pendekatan terhadap tanda-tanda yang biasanya menjadi rujukan para ahli. Pertama adalah pendekatan yang didasarkan pada pandangan Ferdinand de Saussure (1857-1913) yang mengatakan bahwa tanda-tanda disusun dari dua elemen, yaitu aspek citra tentang bunyi (semacam kata atau representasi visual) dan sebuah konsep di mana citra bunyi disandarkan (Sobur, 2009:31).

Tanda, dalam pandangan Saussure, merupakan manifestasi konkret dari citra bunyi dan sering diidentifikasi dengan citra bunyi itu sebagai penanda. Jadi,

penanda dan petanda merupakan unsur-unsur metalistik. Dengan kata lain, di dalam tanda terungkap citra bunyi ataupun konsep sebagai dua komponen yang kehadiran yang lain seperti dua sisi kertas. Bagi Saussure, hubungan antara penanda dan petanda bersifat arbiter (bebas), baik secara kebetulan maupun ditetapkan. Arbiter dalam pengertian penanda tidak mempunyai hubungan ilmiah dengan petanda (Saussure, 1966 dalam Sobur, 2009:32). Menurut Saussure, prinsip arbiter bahasa atau tanda tidak dapat diberlakukan secara mutlak atau sepenuhnya. Ada tanda-tanda yang benar-benar arbiter, tetapi ada pula yang hanya relatif. Kearbiteran bahasa sifatnya bergradasi. Di samping itu, ada pula tanda-tanda yang bermotivasi, yang relatif non arbiter.

Pendekatan yang kedua didasarkan pada pandangan seorang filsuf Amerika, Charles Sanders Peirce (1839-1914). Peirce mengatakan bahwa tanda-tanda berkaitan dengan objek-objek yang menyerupainya, keberadaannya memiliki hubungan sebab-akibat dengan tanda-tanda atau karena ikatan konvensional dengan tanda-tanda tersebut. Ia menggunakan istilah ikon untuk kesamaanya, indeks untuk hubungan sebab-akibat, dan simbol untuk asosiasi konvensional.

Menurut Peirce, sebuah analisis tentang esensi tanda mengarah pada pembuktian bahwa setiap tanda ditentukan oleh objeknya. Pertama, dengan mengikuti sifat objeknya, ketika kita menyebut tanda sebuah ikon. Kedua, menjadi kenyataan dan keberadaannya berkaitan dengan objek individual ketika kita menyebut tanda sebagai indeks. Ketiga, kurang lebih, perkiraan yang pasti

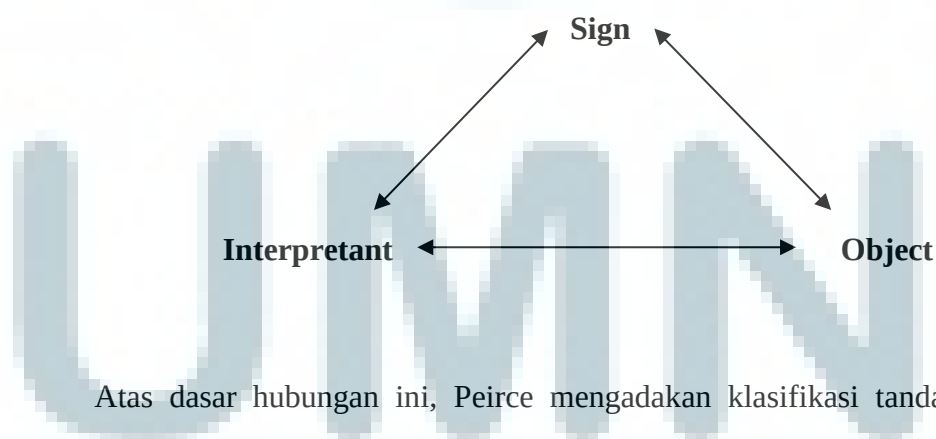
bahwa hal itu diinterpretasikan sebagai objek denotatif sebagai akibat dari suatu kebiasaan ketika kita menyebut tanda sebuah simbol (Sobur, 2009:34-35).

2.8 Semiotika Charles S. Peirce

Charles Sanders Peirce adalah filsuf Amerika yang terkenal karena teori tandanya. Di dalam semiotika, Peirce seringkali mengulang-ulang bahwa secara umum tanda adalah yang mewakili sesuatu bagi seseorang. Sesuatu yang digunakan agar tanda bisa berfungsi, oleh Peirce disebut *ground*. Konsekuensinya, tanda (*sign* atau *representamen*) selalu terdapat dalam hubungan triadik, yakni *sign*, *object*, dan *interpretant* (Sobur, 2009:41).

Proses pemaknaan dari tanda-tanda yang dimaksudkan Peirce jika digambarkan maka akan seperti diagram di bawah ini.

Gambar 2.2 Hubungan Segitiga Makna Charles S. Peirce



Atas dasar hubungan ini, Peirce mengadakan klasifikasi tanda. Tanda merupakan sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk hal lain di luar tanda itu sendiri (Hoed, 2008:21). Tanda yang dikaitkan dengan *ground* dibaginya menjadi

qualisign, *sinsign*, dan *legisign*. *Qualisign* adalah kualitas yang ada pada tanda, misalnya kata-kata kasar, keras lemah, lembut, merdu. *Sinsign* adalah eksistensi aktual benda atau peristiwa yang ada pada tanda; misalnya kata kabur atau keruh yang ada pada urutan kata air sungai keruh yang menandakan bahwa ada hujan di hulu sungai. *Legisign* adalah norma yang dikandung oleh tanda, misalnya rambu-rambu lalu lintas yang menandakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan manusia (Sobur, 2009:40-41).

Berdasarkan objeknya, Peirce membagi tanda atas ikon, indeks, dan simbol. Objek atau acuan tanda adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk tanda (Hoed, 2008:13). Ikon adalah tanda yang hubungan antara penanda dan petandanya bersifat bersamaan bentuk alamiah. Dengan kata lain, ikon adalah hubungan antara tanda dan objek atau acuan yang bersifat kemiripan; misalnya, potret dan peta. Indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan petanda yang bersifat kausal atau sebab akibat, atau tanda yang langsung mengacu pada kenyataan. Tanda dapat pula mengacu kepada *denotatum* melalui konvensi. Tanda seperti itu adalah tanda konvensional yang biasa disebut simbol. Jadi, simbol adalah tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dengan petandanya berdasarkan konvensi masyarakat (Sobur, 2009:41-42).

Tabel 2.2 Trikotomi Ikon/Indeks/Symbol Peirce (Sobur, 2009:34).

Tanda	Ikon	Indeks	Simbol
Ditandai dengan	Persamaan (kesamaan)	Hubungan sebab akibat	Konvensi

Contoh	Gambar-gambar Patung-patung Tokoh besar Foto Reagan	Asap/api Gejala/penyakit	Kata-kata isyarat
Proses	Dapat dilihat	Dapat diperkirakan	Harus dipelajari.

Berdasarkan *interpretant*, tanda (*sign*, *representamen*) dibagi atas *rheme*, *dicent sign* atau *decisign* dan *argument*. *Interpretant* atau pengguna tanda adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda (Hoed, 2008:13). *Rheme* adalah tanda yang memungkinkan orang menafsirkan berdasarkan pilihannya. Misalnya orang yang marah matanya merah dapat saja menandakan bahwa orang itu baru menangis, atau menderita penyakit mata, atau baru bangun, atau ingin tidur. *Decisign* adalah tanda yang sesuai kenyataan. Misalnya jika pada suatu jalan sering terjadi kecelakaan, maka di tepi jalan tersebut dipasang rambu lalu lintas yang menyatakan bahwa di situ sering terjadi kecelakaan. *Argument* adalah tanda yang langsung memberikan alasan tentang sesuatu (Sobur, 2009:42).

Pemaknaan dan penafsiran atas benda atau perilaku tersebut disebut sebagai proses semiosis. Dengan kata lain, proses semiosis adalah proses berdasarkan pengalaman budaya seseorang. Sehingga pemaknaan seseorang akan sesuatu berbeda dengan seorang yang lain, tergantung dari pengalaman budaya yang dimiliki tiap individu tersebut. Peirce juga mengemukakan bahwa proses

semiosis ini tidak terbatas, sehingga interpretan bisa menjadi representamen baru yang kemudian akan melalui proses semiosis tersebut.

Dalam melakukan analisis, penulis akan menggunakan hubungan segitiga makna dari Charles S. Peirce, yaitu representamen (sesuatu) menjadi objek (sesuatu di dalam kognisi manusia) dan kemudian menjadi interpretan (proses penafsiran/pemaknaan). Ketiga hal tersebut sebelumnya akan diklasifikasikan berdasarkan tiga kategori tanda, yaitu ikon, indeks dan juga simbol.

2.9 Kerangka Pemikiran

Secara kesejarahan bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang “bebas dari konflik. Tahun 1945 adalah titian tertinggi proses-proses konfliktual yang ditandai dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perjuangan dan perjalanan konflik yang sangat melelahkan dan memakan banyak korban untuk melawan Belanda (Dharmawan, 2006:8).

Hingga saat ini pun, konflik masih terus terjadi secara berulang dan terus-menerus mereplikasi dirinya dari satu tempat ke lain tempat dengan bentuk yang beragam di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Salah satu konflik yang terjadi di saat ini adalah konflik yang terjadi di Pasar Rumpit, Jakarta Selatan. Konflik ini melibatkan warga Pasar Rumpit dan Warga Menteng Tenggulun yang memperebutkan lahan parkir sebagai salah satu sumber pendapatan mereka.

Okezone.com sebagai media massa kemudian menggambarkan konflik ini pada pemberitaan yang ada dalam *website*-nya. *Okezone.com* selain menyampaikan berita konflik ini dalam bentuk tulis, juga menyampaikannya

dalam bentuk foto berita. Dalam teori yang digali dari Paul Messaris (Ajidarma, 2007:2006), gambar-gambar yang dihasilkan manusia, termasuk fotografi, bisa dipandang sebagai suatu keberaksaraan visual. Dengan kata lain, gambar-gambar itu bisa dibaca. Sehingga gambar-gambar pun merupakan salah satu cara berbahasa. Foto-foto yang terdapat pada *website Okezone.com* tersebut memperlihatkan konflik yang berupa tawuran berbau kekerasan di jalan umum yang dilakukan oleh kedua belah pihak warga tersebut.

Atas dasar itu, penulis melakukan analisis dengan metode semiotika Charles S. Peirce pada foto-foto tersebut. Penulis melakukan klasifikasi tanda ikon, indeks, dan simbol untuk mengetahui representasi konflik yang terkandung dalam foto-foto tersebut.

Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan hubungan segitiga makna dari Charles S. Peirce, yaitu representamen (sesuatu) menjadi objek (sesuatu di dalam kognisi manusia) dan kemudian menjadi interpretan (proses penafsiran/pemaknaan).

Setelah menganalisis foto dengan mengklasifikasikan tanda berdasarkan ikon, indeks, dan simbol, serta menggunakan hubungan segitiga makna dari Charles S. Peirce, diharapkan analisis tersebut dapat membaca representasi konflik yang terkandung dalam foto-foto tawuran di *website Okezone.com* tersebut.

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran

